

HARIAN

# LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI JUMAT, 01 NOVEMBER 2024



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

[www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com)

[@lenteratoday](https://www.instagram.com/lenteratoday)

[@lenteratoday](https://www.twitter.com/lenteratoday)

[@lenteratoday](https://www.tiktok.com/@lenteratoday)

[f lentera.tv](https://www.facebook.com/lentera.tv)

[Lentera TV Media](https://www.youtube.com/LenteraTVMedia)

# Sujud Syukur Buruh 21 Pasal di UU Ciptaker Diubah

**T**angis haru dan sujud syukur dilakukan ribuan buruh di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, saat menggelar aksi unjuk rasa Kamis (31/11/2024). Kebahagiaan itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah pemohon lain terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). MK mengubah sekitar 21 pasal dalam UU Ciptaker. Pasal-pasal yang digugat itu terkait pengupahan, hubungan kerja, hingga tenaga kerja asing. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan ada perimpitan norma dalam UU 13/2003 dengan norma dalam UU 6/2023 tentang Ciptaker. MK mengatakan hal itu dapat mengancam perlindungan hak para pekerja. Beberapa poin penting hasil gugatan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya berlaku 5 tahun dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tak boleh sewenang-wenang. Terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bisa dikatakn sebagai ancaman dari luar, putusan MK menegaskan TKA yang dapat dipekerjakan di Indonesia hanya tenaga hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta dengan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

**Government (Hal.2)  
Kemenperin Bakal  
Blokir IMEI iPhone 16  
dan Google Pixel yang  
Diperjualbelikan  
di Indonesia**

Baca Hal 11....

○○○

*Ratusan buruh melakukan sujud syukur di jalanan sebagai wujud rasa senang karena Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi beberapa pasal dalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker), Kamis (31/10/2024). (Antara)*



## Daftar Pasal-pasal yang Diubah MK

1. Menyatakan frasa 'Pemerintah Pusat' dalam Pasal 42 ayat (1) dalam pasal 81 angka 4 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menteri yang bertanggung jawab di bidang (urusan) ketenagakerjaan in casu menteri Tenaga Kerja'
2. Menyatakan Pasal 42 ayat (4) UU 6/2023 yang menyatakan 'tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya untuk jabatan dan waktu tertentu' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan dengan memerhatikan pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.
3. Menyatakan Pasal 56 ayat (3) UU 6/2023 yang menyatakan 'jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan bahwa jangka waktu tidak melebihi 5 tahun, termasuk perpanjangan.
4. Menyatakan Pasal 57 ayat 1 UU 6/2023 yang menyatakan 'Perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan harus dibuat secara tertulis sesuai ketentuan.
5. Menyatakan Pasal 64 ayat 2 UU 6/2023 yang menyatakan 'Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan bahwa Menteri menetapkan sesuai jenis dan bidang pekerjaan alih daya dalam perjanjian tertulis.
6. Menyatakan Pasal 79 ayat 2 huruf b UU 6/2023 yang menyatakan 'Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan mencakup 'atau 2 hari untuk 5 hari kerja'.
7. Menyatakan kata 'dapat' dalam pasal 79 ayat 5 dalam pasal 81 angka 25 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
8. Menyatakan Pasal 88 ayat 1 UU 6/2023 yang menyatakan 'Setiap pekerja/ Buruh berhak atas penghasilan yang layak' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan mencakup penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup wajar pekerja/buruh.

Lanjut di hal 11...

# Kemenperin Bakal Blokir IMEI iPhone 16 dan Google Pixel yang Diperjualbelikan di Indonesia

**JAKARTA**-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memantau peredaran iPhone 16 dan Google Pixel yang masuk ke Indonesia sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengatakan Kemenperin akan memblokir ponsel keluaran Apple 16 dan Google Pixel tersebut jika diperjualbelikan di Indonesia.

"Dalam waktu dekat, kalau seandainya masih ada pihak-pihak tertentu yang memperjualbelikan, m e m p e r d a g a n k a n, mengkomersilkan barang-barang tersebut, kami pertimbangkan untuk menonaktifkan IMEI-nya," kata Febri di Kantor Kemenperin, Kamis (31/10/2024).

"Untuk Google Pixel (juga) belum ada sertifikat TKDN. Sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," terang Febri.

Dia menjelaskan produk iPhone 16 dan Google Pixel yang dibawa penumpang dari luar negeri memang masuk secara legal. Hanya saja, tidak untuk diperjualbelikan dan akan berstatus ilegal jika hal tersebut dilakukan, sebab perizinannya untuk pemakaian pribadi.

"Sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, syaratnya, pertama penumpang maksimal dua (unit) itu dalam satu tahun, (misal) satu orang penumpang itu kalau berkali-kali dalam setahun bawa alat elektronik itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," jelas Febri.

Menurut Febri, pembelian kedua ponsel tersebut dari penumpang dapat merugikan pembeli, seperti risiko tidak adanya garansi dari distributor resmi.

Kemenperin juga mengimbau penumpangnya yang membawa iPhone 16 maupun Google Pixel dari luar negeri, untuk tidak memperjualbelikan barang bawaannya tersebut.

Sebab, Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Febri membeberkan data penjualan dan importasi produk Handphone, Komputer Genggam dan Tablet (HKT) produk Apple sepanjang 2023 dan 2024 sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia.

Menurut dia, jika perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga Rp 5 juta per unit



Apple iPhone 16 dipajang di Apple Store. (Ist)

di dalam negeri. Maka nilai penjualan untuk satu tahun mencapai Rp 19 triliun.

"Dan tentu jauh lebih tinggi lagi jika ditambah dengan impor dan penjualan produk HKT mereka sejak tahun 2016. Ironisnya, dengan nilai penjualan sangat tinggi tersebut, mereka sangat sulit untuk merealisasikan 100 persen komitmen investasi senilai Rp 1,7 triliun selama delapan tahun di Indonesia," jelas Febri.

Sebelumnya, Kemenperin memperkirakan pada Agustus-Oktober 2024, sekitar 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Sementara berdasarkan data yang masuk ke Kemenperin, jumlah ponsel Google Pixel yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman sekitar 22.000 unit selama tahun 2024 ini.

Adapun Apple sudah mendapat izin menjajakan produk-produknya di dalam negeri dan telah memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Namun masa berlaku sertifikat tersebut telah habis.

Kemudian untuk memperpanjang sertifikat tersebut, Apple harus merealisasikan sisa komitmen investasi di Indonesia sebesar Rp 240 miliar dari total komitmen Rp 1,71 triliun.

Kemenperin memastikan jika perusahaan raksasa sektor teknologi itu telah merealisasikan sisa investasi Rp 240 miliar tersebut, maka Kemenperin akan segera memberikan izin penjualan iPhone 16.

Apple diketahui telah mengajukan surat berisi permohonan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun tujuan utama dari pertemuan tersebut untuk membahas investasi dan izin edar iPhone 16 di Indonesia.

"Saya memang sudah melihat informasi Apple sudah kirimkan surat kepada Pak Menteri (Agus Gumiwang)," kata Febri.

## Disorot Media Asing

Sejumlah media asing menyoroti isu iPhone 16 yang saat ini dilarang untuk diperjualbelikan di Indonesia. Hal ini mencuat setelah Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang meminta Apple untuk memperbarui sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan menambah investasi mereka di Tanah Air.

Sebagian besar dari media asing ini mengutip pernyataan Agus dan fokus pada isu komitmen investasi yang dijanjikan, namun belum dituntaskan Apple hingga saat ini.

Dua media asing yang fokus membahas masalah ini adalah TheRegister dan AppleInsider, outlet media yang fokus membahas soal gadget Apple. "iPhone 16 dilanda masalah di Indonesia lantaran tak bisa dijual di sana. Supaya ponsel itu bisa dijual, pemerintah setempat meminta Apple untuk memperbarui sertifikasi, investasi, dan persyaratan TKDN," kata AppleInsider.

"Pemerintah mengutip janji Apple yang belum terpenuhi untuk berinvestasi di Indonesia. Ini juga dipicu oleh kegagalan memenuhi persyaratan untuk komponen yang diproduksi secara lokal. Kedua hal ini menjadi alasan mengapa iPhone 16 dilarang dijual di Indonesia," tulis TheRegister.

Selain menekankan pada isu investasi dan TKDN yang belum dipenuhi Apple, media asing lain juga menyoroti soal rumitnya peraturan dan birokrasi di Indonesia untuk mengedarkan produk elektronik, termasuk smartphone baru.

Hal itu disorot oleh Channel News Asia yang mereka rangkum dari beberapa reaksi warganet yang berkomentar di media sosial. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+ "Banyak sekali birokrasi yang harus diikuti Apple di Indonesia" dilansir Channel News Asia yang mengutip reaksi seorang warganet.

Kemudian, media Business Insider menyoroti potensi dampak larangan penjualan iPhone 16 di Tanah Air. Media ini mewartakan, Indonesia

menjadi pasar yang potensial dan pertumbuhan penjualan ponsel premium juga meningkat.

"Apple tak bisa menjual iPhone 16 di negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia adalah pasar yang cukup berkembang bagi Apple, lantaran jutaan iPhone sudah terjual di negara ini. Terlebih, pasar ponsel premium di Indonesia juga meningkat dari tahun ke tahun," tulis BusinessInsider.

Ada pula media asing yang fokus pada nasib turis pemilik iPhone 16 yang tak bisa memakai ponselnya lagi di Indonesia. Sebab, ponsel tersebut dianggap ilegal oleh pemerintah di sini. Angle ini ditulis oleh dua media asing bernama News18 dan PhoneArena.

"Pengumuman ini membuat wisatawan alias turis akan kebingungan karena mereka kini tak tahu soal apa yang akan terjadi pada pemilik iPhone 16 yang sudah berkunjung ke Indonesia atau mereka yang berencana berkunjung dalam waktu dekat," tulis News18.

"Apakah turis yang membawa iPhone 16 ke Indonesia akan bisa memakai ponselnya? Ya, tentu saja masih bisa, asalkan mereka mendaftarkan perangkat miliknya ketika mereka sampai di negara tersebut," tulis PhoneArena. (wid, rls, ist/dya)

## CARA CEK STATUS IMEI PONSEL

- Tekan \*#06# di ponsel anda
- Tekan "call"
- Kode IMEI akan segera tampil di layar
- Masuk ke Situs <https://imei.kemenperin.go.id/>
- Cek IMEI  
Masukan 15 digit nomer IMEI dari smartphone anda tekan tombol "simpan"
- Setelah itu akan muncul pemberitahuan seperti dibawah berikut :

\*Terdaftar

Kode IMEI akan segera tampil di layar

\*Tidak Terdaftar

IMEI tidak terdaftar di database Kemenperins

## Soal Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

# Mendagri: Kemungkinan dari KPU

**JAKARTA**-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan tidak ada kebocoran data pemilih untuk Pilkada 2024 di lembaga yang dipimpinnya. Kalaupun ada kebocoran data, kemungkinan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tito mengaku daftar pemilih potensial sudah diserahkan ke KPU. Di mana total pemilih untuk Pilkada serentak 2024 kurang lebih 207 juta orang.

"Kami serahkan langsung saat itu kepada ketua (KPU), 2 Mei 2024, Pak Hasyim Asyari saat masih (menjabat)," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Mendagri dua periode ini melanjutkan, data tersebut sudah diberikan dalam bentuk softcopy yang telah dienkripsi dan disusun berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota. Ia memastikan tidak akan terjadi kebocoran.

"Jadi karena sudah dienkripsi enggak mungkin akan terjadi kebocoran, kalau terjadi kebocoran tidak mungkin bocornya di Dukcapil Kemendagri. Tapi yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan kebocoran di KPU sendiri," jelas Tito.

Data tersebut, kata Tito, telah diberikan KPU Pusat ke KPUD untuk melakukan verifikasi lapangan, dan Kemendagri membantu setiap bulan untuk melakukan pemantauan.

"Kita tahu setiap bulan data masyarakat ini bergerak. Ada yang wafat, ada yang masuk anggota TNI/Polri, enggak memenuhi hak pilih dan seterusnya, pindah alamat, nah ini selalu kita update karena kita mendapatkan input dari seluruh kabupaten kota," paparnya.

"Nah setiap bulan, semua perubahan itu, pergerakan itu, kita serahkan kepada KPU Pusat untuk diteruskan kepada KPUD masing-masing untuk menjadi bahan melakukan verifikasi di lapangan. Sehingga akan terbentuk betul-betul data pemilih yang akurat yang permanen nantinya," demikian Tito Karnavian.

Dia mengklaim bahwa server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) hingga kini belum pernah diretas. Namun, kata Tito, bukan berarti dirinya menantang peretas untuk menyerang.

"Sampai saat ini, sepertinya untuk server Dukcapil belum pernah tembus, tapi saya enggak nantang teman-teman hacker. Tolong jangan juga deh dihajar," kata Tito.



Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk (kiri) mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). (Ist)

Mulanya, Tito memaparkan pagu alokasi anggaran untuk setiap unit kerja eselon I Kemendagri tahun anggaran 2025. Untuk Ditjen Dukcapil, total pagu dialokasikan sebesar Rp 2.223.059.937 dan menjadi pagu terbesar.

Anggaran yang besar ini, kata Tito, diperuntukkan bagi digitalisasi sistem layanan pemerintahan. "Yang paling banyak adalah Dukcapil, ini pinjaman dari World Bank, untuk penguatan menjadi platform utama jantungnya digitalisasi pemerintahan karena meng-

gunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," tutur dia.

Nantinya, kata dia, digitalisasi ini akan berupa single sign-on. "Setelah itu masuk, di-encrypt, dan di-enrich menjadi single sign-on. Satu warga negara memiliki satu nomor unik untuk masuk ke semua layanan publik."

Tito mengungkapkan, pemerintah menargetkan untuk memperkuat infra-struktur teknologi informasi Dukcapil secepatnya. Meskipun demikian, kata Tito, tak bisa terburu-buru karena sistem yang dibangun harus kuat.

"Kami mohon dukungan dari Bapak-Ibu sekalian, karena kalau kita mau buru-buru launching, jantungnya ini tidak kuat sistemnya," kata dia.

Dia mengungkapkan tiga hal yang harus dipastikan kesiapannya terlebih dahulu. Mulai dari kemampuan penyimpanan, bandwidth, hingga keamanan sibernya. "Jangan sampai di-hack." (wid,rls,ant/dya)

## Disebut Habiskan Uang Negara, DPR Usul KPU Jadi Lembaga Ad Hoc

**JAKARTA**-Badan Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc. Dengan masa tuas hana selama dua tahun untuk persiapan dan pelaksanaan teknis pemilihan umum, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan usulannya itu diperlukan agar negara dapat menghemat anggaran, khususnya ketika KPU tidak sedang berada pada tahun-tahun Pemilu. Terlebih lagi, sistem tahapan pemilu yang dilaksanakan secara serentak dapat selesai dalam waktu dua tahun.

"Jadi kita sedang berpikir sedang berpikir di DPR, justru KPU itu hanya lembaga ad hoc, dua tahun saja. Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan," kata Saleh saat rapat dengar pendapat antara Baleg DPR RI seperti dilansir dari TV Parlemen pada Kamis (31/10/2024).

Dengan adanya sistem pemilihan umum serentak pada 2024, Saleh menilai bahwa KPU selama 3 hingga 5 tahun ke depan selama setelah Pemilu, hanya akan melakukan

sejumlah kegiatan bimbingan teknis (bimtek) semata. Menurutnya, hal itu tidak terlalu urgen dan di sisi lain, dia pun ragu terhadap kegiatan bimtek tersebut.

"Mereka datangnya itu bimtek saja ke Jakarta ini, saya tahu persis. Sebentar-sebentar nanti bimtek datang ke Jakarta, enggak tahu apa yang dibimtekkan itu," tegasnya.

Selain itu, Saleh juga menyarankan agar ke depan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang selama ini menjadi lembaga ad hoc dari KPU ketika pelaksanaan pemilu tiba, agar ditiadakan. Pasanya, kata dia, motif "permainan" Pemilu lebih banyak terjadi di jenjang PPK.

Untuk menghemat anggaran, menurut Saleh, nantinya tahapan rekapitulasi suara di jenjang PPK ditiadakan sehingga dapat langsung dilakukan pada KPU tingkat kabupaten/kota. Namun, sebelum merealisasikannya, dia menilai bahwa harus ada mekanisme yang harus dipikirkan lebih lanjut agar



Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Saleh Partaonan Daulay

KPU tingkat kabupaten/kota tidak terjadi beban kerja ganda.

"Dengan ada PPK, begitu ada jenjang dari sini pindah ke sana, di situ ada pemaknaan baru dari penyelenggaraan pemilu. Mohon maaf, teman-teman yang ikut Pemilu sudah mengerti," imbuhnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Rendy Umboh menjelaskan bahwa keserentakan pelaksanaan pemilu tingkat nasional maupun tingkat lokal, seharusnya sebaiknya dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak terlalu berjauhan. (wid,rls,ant/dya)

# Giliran ALMI Anak Usaha Maspion Hentikan Operasional

**JAKARTA-** Musim gugur dunia industri di Indonesia berlanjut. Usai PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex diputus pailit, kini giliran PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI) resmi menghentikan kegiatan operasi perusahaan sejak Kamis (31/10/2024).

Alasan penutupan karena terus merugi. Pendapatan PT ALMI menurun hingga titik terendah dari kuantitas penjualan awal sekitar 10 ribu ton per bulan menjadi kurang dari 2 ribu.

"Manajemen memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasi untuk jangka waktu yang belum ditentukan," kata Direktur dan Sekretaris ALMI Wibowo Suryadinata dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (29/10/2024). Diketahui, jumlah karyawan Alumindo Light Metal Industry (ALMI) sekitar 1.225 orang.

Wibowo mengatakan langkah ini merupakan respons atas kinerja keuangan perusahaan yang terus menurun. Dia menyebut pada awal ALMI melantai di pasar saham, perusahaan pernah menjadi industri penghasil aluminium lembaran terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun, kondisi itu berubah saat terjadi krisis global pada 2018. "Perseroan terkena dampak akibat penetapan tarif bea masuk ke negara Amerika yang merupakan negara tujuan ekspor utama," kata dia.

Meski demikian, Wibowo mengatakan perseroan telah berupaya untuk mengatasi krisis di perusahaan itu. Dia menyebut pada 2021, para pemegang saham ALMI juga telah menambah modal tanpa hak memesan efek sebesar Rp 800 miliar melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Modal itu untuk meringankan biaya utang ALMI.

Wibowo mengatakan ALMI juga telah berupaya mencari pasar penjualan yang baru atau menggandeng para investor dalam bidang aluminium lembaran. Namun, upaya itu masih nihil. "Upaya tersebut belum memberikan hasil sehingga pendapat perseroan terus mengamai penurunan," kata dia.

Menanggapi persoalan ALMI, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman mengatakan keputusan perusahaan itu pasti sudah mempertimbangkan banyak hal sekaligus menjadi keputusan bisnis. Dia menyebut penghentian ini pasti akan memengaruhi investasi pemegang saham publik. "Dengan adanya penghentian operasional tentunya akan mempengaruhi



(Ilustrasi) Setelah 45 tahun, PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI) menghentikan seluruh aktivitasnya. (Dok.ist)

keputusan investasi pemegang saham publik," kata Nyoman dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (31/10/2024).

## Pemerintah Diingatkan Industri Lain

Pengamat hukum dan ekonomi pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkankondisi PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex bisa terjadi pada industri lain, bahkan UMKM.

"Kasus Sritex memang menjadi contoh besar, tetapi pabrik-pabrik lain termasuk tekstil skala kecil hingga menengah pun kini menghadapi ancaman serupa. Mereka juga harus diperhatikan," papar pengamat hukum dan ekonomi pembangunan, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Hingga awal Juni 2024, setidaknya ada lima pabrik tekstil yang tutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ada pula yang masih bisa bertahan namun harus melakukan efisiensi karyawan.

Sebut saja, PT Sai Apparel di Jawa Tengah melakukan PHK sebanyak 8.000 pekerja, PT Sinar Panca Jaya di Semarang melakukan PHK 2.000 pekerja. PT Bitratex di Semarang melakukan PHK 400 pekerja. PT Johartex di Magelang melakukan PHK 300 pekerja dan PT Pulomas, Bandung melakukan PHK 100 pekerja.

Terkait upaya penyelamatan Sritex, Hardjuno menyarankan pemerintah fokus kepada 20 ribu pekerjanya. Upaya mitigasi harus disiapkan jika kemungkinan terburuk yang terjadi. Dalam hal ini, pemerintah perlu mendorong restrukturisasi Sritex yang didera utang yang nyaris Rp25 triliun.

"Saya kira sudah benar jika Presiden Prabowo menginstruksikan empat menteri untuk mendampingi perusahaan tersebut. Dalam hal ini, keputusan pailit dari

Pengadilan Niaga masih terbuka untuk kasasi dan peninjauan kembali (PK). Status hukumnya belum final dan memungkinkan adanya opsi restrukturisasi yang lebih baik," kata Hardjuno.

Terkait restrukturisasi, lanjut kandidat doktor bidang hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur itu, kata kuncinya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan usaha industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional. Jadi, bukan hanya Sritex.

Dia tak sepakat jika pemerintah memberikan dana talangan (bailout) kepada Sritex. Alasannya, proses pertanggungjawaban dana bailout menjadi sangat rumit.

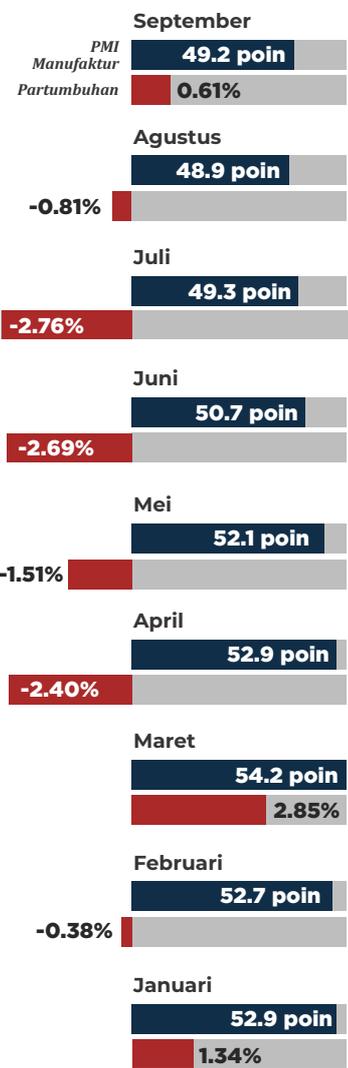
"Solusi yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bisa menerbitkan obligasi atau saham baru. Ini tidak hanya memberikan modal tambahan bagi Sritex untuk bayar utang. Tapi juga mengurangi beban langsung kepada negara," terangnya.

Ke depan, kata dia, penting bagi pemerintah untuk memperkuat industri tekstil nasional. Agar mampu bersaing di tengah tekanan impor. Langkah ini bisa mencakup kebijakan perdagangan yang lebih ketat dan dukungan terhadap industri dalam negeri melalui insentif atau perlindungan tarif bagi produk lokal.

Terkait utang Sritex di sejumlah bank pelat merah, kata Hardjuno, pendekatan utama yang perlu dipertimbangkan adalah restrukturisasi utang secara transparan dan efektif. Saat ini, utang Sritex ke sejumlah bank BUMN cukup gede. Utang di BNI saja mencapai US\$ 23,8 juta, serta BPD, mencerminkan risiko signifikan terhadap stabilitas aset bank tersebut.

"Penting bagi pemerintah dan pihak bank untuk melakukan pendekatan yang hati-hati agar dana

## PMI Manufaktur Indonesia (Jan 2024-Sep 2024)



publik yang digunakan bank BUMN tidak hilang," ungkapnya.

Jika restrukturisasi menyulitkan, lanjutnya, masih ada opsi lain. Penjualan aset non-inti Sritex bisa menjadi pilihan untuk melunasi sebagian kewajiban kepada kreditur, termasuk bank BUMN. Dalam hal ini, dukungan pemerintah dalam memperkuat dasar hukum restrukturisasi utang sangat diperlukan.

"Misalnya, pemerintah memberikan jaminan bahwa bank tidak merugi dalam jangka panjang dan menstabilkan sektor tekstil agar tidak terjadi pengurangan drastis jumlah pemain industri lokal," imbuhnya. (wid, bei, ant, rls/dya)

# Diduga Terlibat Judi Online, Polisi Tangkap Pejabat Kemen Komdigi



**4 Juta**  
penduduk Indonesia  
terlibat judi online



**Rp 600 triliun**  
nilai transaksi hingga  
kuartal 1/2024



**30-50 tahun**  
rata-rata kelompok usia  
pemain judi online

Sumber: PPATK

## NILAI TRANSAKSI JUDI ONLINE RI

2023

**Rp 327 Triliun**

2022

**Rp 104.42 Triliun**

2021

**Rp 57.91 Triliun**

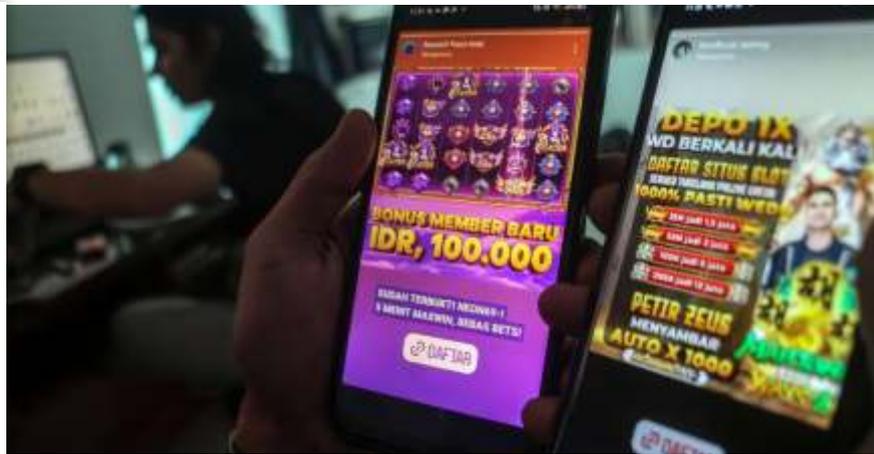
2020

**Rp 15.77 Triliun**

2019

**6.18 juta**

Sumber: PPATK



(Ilustrasi) Warga melihat iklan judi online melalui gawainya di Jakarta. (Ist)

Di sisi lain, Trunoyudo menjelaskan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah berkomitmen untuk memberantas praktik judi online di Indonesia.

"Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah," ujar Trunoyudo.

"Polri akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online," tambah dia.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menanggapi ada jajaran kementerian yang dipanggil polisi terkait judi online (judol). Ia meminta agar kooperatif selama pemeriksaan.

"Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawah Komdigi agar kooperatif kepada aparat penegak hukum, apabila terdapat indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan kementerian untuk dapat membantu upaya memerangi judi online secara terang benderang," kata Meutya dalam keterangannya.

Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dalam memberantas judi online, yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa kita.

"Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami," tutur dia.

Meutya bilang ASN di Komdigi sudah menandatangani pakta integritas terkait judol. Seharusnya mereka tidak main-main lagi.

"Seluruh ASN di lingkungan

Kementerian Komdigi telah menandatangani pakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital adalah komitmen kami sesuai arahan presiden," kata dia.

"Kami mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi mematuhi pakta tersebut," imbuhnya.

Ia mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas upaya penangkapan dan tindakan hukum yang cepat dan tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat.

"Kami telah dan akan berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutup Politikus Golkar itu.

### Disinggung Judi Penerimaan Negara

Sebelumnya, akil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyinggung soal maraknya aktivitas underground economy di dalam negeri, seperti judi online (judol) hingga gim daring yang tak dikenakan pajak.

Underground economy dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam statistik resmi atau tak dilaporkan kepada pemerintah.

"Sudah ada angkanya, kemarin saya juga merinding disampaikan oleh Kominfo jumlahnya, onshore dan offshore. Yang melakukan online betting kepada sepakbola di Inggris, orang Indonesia banyak sekali," kata Anggito saat memberikan orasi ilmiahnya dalam rapat terbuka senat yang digelar di Sekolah Vokasi UGM,

Sleman, DIY, Senin (28/10/2024).

Anggito menemukan masyarakat Indonesia amat leluasa bertaruh dan ikut judi bola online yang tidak dilarang di Inggris. Penghasilan dari judi bola ini pun luput dari pajak.

"Udah enggak kena denda, dianggap tidak haram (di Inggris), enggak bayar pajak lagi, padahal dia menang itu. Kalau dia dapat winning, itu kan nambah PPh (pajak penghasilan) toh mestinya," tutur Anggito.

"Tapi kan enggak mungkin dia ngelaporkan penghasilan dari judi kan enggak mungkin, jadi teman-teman pajak mesti pintar untuk mencari bahwa ini ada tambahan income yang berasal dari underground economy," tuturnya.

Tak cuma judol, Anggito juga menyoroti penghasilan tak kena pajak dari gim daring yang kerap digandrungi masyarakat saat ini.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak teregister, tidak ter-record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kita ambil itu," ucapnya.

Menurut Anggito, maraknya judi online, banjir barang impor, masuknya barang ilegal dan penyelundupan menjadi tantangannya di Kemenkeu, khususnya dalam menambah penerimaan negara.

Penolakan terkait ide pajak judol diungkapkan Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Ia menjelaskan, pajak memang tidak mengenal halal-haram dan baik-buruk, namun menjadikan perkara haram dan buruk sebagai objek pajak sama saja dengan pemerintah meleagalkan kegiatan tersebut.

"Saya masih berposisi seperti pajak judi online dilontarkan oleh Menkominfo waktu itu beberapa bulan yang lalu," kata Huda.

Imbas pajak judi online, kata Huda, membuat para pelaku judi online memiliki dalih bahwa mereka sudah taat hukum. Pasalnya, aktivitas yang mereka lakoni menjadi sasaran pajak bagi pemasukan yang diakui negara. Hal ini akan membuat praktik judi online tumbuh subur dan lebih tak terkontrol ke depan.

Huda memandang, justru penyakit utamanya ada di praktik judi online. Aktivitas ini harusnya diobati agar sudah menjadi penyakit sosial yang menjangkit masyarakat.

"Saya rasa Anggito memang tidak pantas mengucapkan hal tersebut," tegas Huda. (wid, rls, ant/ist)

**JAKARTA**-Polri memeriksa pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena diduga terlibat dalam kasus judi online (judol). Diketahui, saat menginstruksikan pemberantasan judol, Presiden Prabowo sebut kerugian negara akibat kegiatan melanggar hukum ini ditaksir mencapai Rp 900 triliun tiap tahunnya.

"Terkait salah satu pegawai pada kementerian Komdigi (Kominfo) masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisno Andiko dalam keterangan, Kamis (31/10/2024).

Trunoyudo belum mengungkapkan identitas pejabat dimaksud. Ia hanya menjelaskan, penyidik masih terus melakukan pendalaman.

"Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini oleh karena itu tunggu hasilnya dari penyidik Polri," ungkapnya.

# Intervensi Gizi dan Cegah Stunting, Pemkot Batu Gaungkan Gemarikan

**BATU** – Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian menggaungkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Gerakan ini diikuti ratusan anak sekolah Kota Batu di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu, Kamis (31/10/24).

Peserta Gemarikan ini melibatkan hingga 150 siswa dari 13 Sekolah Dasar di Kota Batu. Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi ikan demi kesehatan dan pemenuhan gizi anak sejak dini.

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengatakan jika kesadaran makan ikan harus dipupuk sejak dini. Menurutnya, mengonsumsi ikan sangat penting sebagai upaya pencegahan stunting dan peningkatan gizi.

Apalagi ikan merupakan sumber protein dan omega-3 yang tinggi serta rendah kolesterol yang tentunya

sangat baik untuk menunjang pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak.

“Kami ingin melihat generasi anak Kota Batu yang sehat. Kuncinya adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi seperti ikan,” ujar Aries.Gemarikan

Menurut Aries, untuk menumbuhkan kesadaran makan ikan ini butuh kolaborasi baik antara pemerintah bersama seluruh pihak dan juga masyarakat secara berkelanjutan.

“Kami berharap acara seperti ini dapat dilanjutkan dan digiatkan, agar anak-anak terbiasa mengonsumsi ikan dan menikmati gizi sehat yang terkandung di dalamnya,” pungkas Aries.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Heru Yulianto, menjelaskan bahwa gerakan Gemarikan ini diselenggarakan untuk menum-

buhkan minat anak-anak dalam mengonsumsi ikan.

Berdasarkan data, konsumsi ikan di Jawa Timur hanya mencapai 51,45 kg per orang per tahun. Tentu kegiatan ini dapat mendorong kesadaran akan tingginya manfaat makan ikan dapat meningkat, khususnya di kalangan masyarakat Kota Batu.

Kegiatan ini sendiri diantaranya diisi dengan penyampaian materi tentang manfaat mengonsumsi ikan, jenis-jenis ikan yang baik untuk dikonsumsi, serta kandungan gizi dalam ikan.

Antusiasme peserta mengikuti



Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai mengajak 150 siswa kelas 1 dan 2 dari 13 SD dalam agenda Gemarikan (Foto: Diskominfo Kota Batu)

permainan interaktif serta kuis seputar gizi ikan ini cukup tinggi. Acara ini diakhiri dengan pemberian produk olahan ikan berupa otak-otak ikan untuk para siswa.(Santi,rls/dya)

## Salurkan Bantuan Sosial di Kota Malang

# Pj Gubernur Jatim Ajak Dunia Usaha Tingkatkan Kepedulian



**MALANG** – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyalurkan Bantuan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) wilayah Kota Malang di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang yang berada pada naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Kamis (31/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Adhy juga mengajak dunia usaha di Jatim agar dapat memberikan berbagai CSR guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian PPKS.

“Ini semua bagian dari upaya kita untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga mengajak dunia usaha untuk

peduli dalam menyejahterakan masyarakat Jatim,” ajaknya.

Bantuan Sosial yang diberikan yaitu Program PKH Plus sebesar Rp94 juta untuk 188 lansia penerima manfaat, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp85,5 juta bagi 95 penerima manfaat, permakanan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak untuk 16 jiwa sebesar Rp24,4 juta dan Bansos bagi Wanita Rentan Sosial Ekonomi (WRSE) untuk 60 penerima manfaat sebesar Rp180 juta.

Lalu, bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) masing-masing sebesar tiga juta rupiah, bantuan kemandirian klien UPT RSBN Malang untuk 10 orang masing-masing lima juta rupiah, ada juga zakat produktif dari BUMD Jatim untuk 25 orang masing-masing Rp500 ribu.

Tak hanya membagikan Bansos bagi PPKS, Pj. Gubernur Adhy juga memberikan insentif kepada pilar-pilar sosial yang telah berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan sosial Jawa Timur, khususnya di Kota Malang.

Adapun insentif bagi pilar-pilar sosial tersebut berupa uang masing-masing Rp1,5 juta per triwulan untuk

lima Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 45 Taruna Siaga Bencana (Tagana) masing-masing sebesar Rp750 ribu per triwulan, 10 Pendamping PKH Plus yang masing-masing sebesar Rp900 ribu per triwulan, empat orang pendamping ASPD masing-masing Rp6 juta per tahun.

“Dengan adanya program bantuan sosial ini diharapkan mampu memberikan penguatan untuk lebih mandiri dan sejahtera ke depannya,” ujar Adhy. Usai menyalurkan berbagai bansos bagi PPKS, Adhy berkesempatan menyapa para klien binaan yang ada di UPT RSBN Malang dan mengapresiasi peran dari keberadaan panti netra tersebut.

Ia menilai, keberadaan UPT RSBN ini sangat penting dalam memberikan penguatan-penguatan khususnya bagi masyarakat yang netra, sehingga dengan pelatihan dan ketrampilan yang diberikan mampu menumbuhkan kepercayaan diri serta kemampuan bertahan hidup dengan kemandiriannya.

“UPT netra ini tempat pembinaan bagi warga yang tuna netra, tidak ada lain netra harus diberikan perlindungan, akses dan kemampuan untuk bisa nantinya bertahan hidup dan mendapatkan penghasilan,” ungkapnya.

Secara khusus, Pj Gubernur Adhy juga mendonasikan sejumlah uang untuk diwujudkan dalam bentuk peralatan dan perlengkapan mobilitas

yang menunjang kegiatan-kegiatan di UPT RSBN Malang ini.

“Ini juga ada pak direktur Bank Jatim, jadi saya bantu untuk UPT RSBN ini 50 juta, pak direktur Bank Jatim 50 juta, jadi total 100 juta, kami ingin yang diberikan ini bisa bermanfaat dan berkah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, UPT RSBN Malang merupakan UPT yang berada di naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. UPT ini adalah panti khusus untuk rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra.

UPT RSBN Malang memiliki kapasitas daya tampung pelayanan sebanyak 105 klien disabilitas netra yang di asramakan selama dua tahun untuk menjalani proses rehabilitasi pelayanan sosial.

Selama dua tahun tersebut, klien disabilitas netra akan diberikan pelayanan penguatan dan berbagai ketrampilan mulai pijat, kerajinan tangan, pembuatan aroma terapi dan baca tulis huruf Braille sebagai dasar pelayanan.

Selain itu, UPT RSBN Malang ini juga memiliki program dan kegiatan unggulan bagi disabilitas netra, diantaranya Jasa Layanan Netra Mobile Unit (JANETA MU), Belajar Orientasi Mobilitas bagi Masyarakat dan Komunitas (BOMBASTIS) dan Siap Jangkau dan Edukasi Disabilitas di Masyarakat dan Komunitas (SI JELITA MANIS). (Lutfi,rls/dya)



# Slank Gelar Konser "Pasar Malam"

## Rayakan 41 Tahun Berkarya Awal Tahun 2025

**GRUP** band Slank akan menggelar konser bertajuk "Pasar Malam Empat Satoe Slank" di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 4 Januari 2025.

"Konser 'Pasar Malam Empat Satoe Slank' ini konsepnya festival pasar malam, jadi rencananya kita mau menghadirkan sesuatu yang berbeda dari konser-konser Slank sebelumnya," kata Bimbim Slank dalam siaran pers band pada Rabu (30/10/2024).

"Ada games, hiburan, pertunjukan, dan akan banyak tenant UMKM yang menjual makanan dan mainan anak-anak, ada juga merchandise official Slank. Ini akan jadi anniversary Slank yang seru banget sih," ia menambahkan.

Konser "Pasar Malam Empat Satoe Slank" diadakan untuk merayakan ulang tahun ke-41 Slank, yang digawangi oleh Kaka (vokal), Bimbim (drum), Ridho Hafiedz (gitar), Abdee Negara (gitar), dan Ivanka (bassist).

Band yang bermarkas di Gang Potlot di Jakarta Selatan ini akan menampilkan karya-karya mereka dalam konser perayaan ulang tahun, yang diselenggarakan bekerja sama dengan promotor PT Expo Indonesia Jaya (ExpoIndo).

Direktur Operasional PT ExpoIndo Novry Hetharia mengatakan bahwa konser "Pasar Malam Empat Satoe Slank" akan menampilkan perjalanan panjang Slank dalam bermusik.

"Selain sebagai perayaan karya-karya Slank, konser 'Pasar Malam Empat Satoe Slank' juga menjadi momentum dan koneksi bersejarah bagi Slank, Slankers, serta semua pihak yang telah mendukung perjalanan kreatif Slank hingga," katanya.

Kaka ingin konser perayaan ulang tahun Slank bisa dinikmati oleh semua penggemar band, yang disebut Slankers.

"Ini momen langka dan bakal seru banget. Jadi Slankers mulai dari kakek nenek sampe anak-anak harus datang, karena acara ini dibuat untuk semua kalangan dan semua umur," kata Kaka.

Tiket konser "Pasar Malam Empat Satoe Slank" dijual dengan harga Rp50 ribu untuk kategori Festival Presale 1, Rp75 ribu untuk kategori Festival Presale 2, Rp100 ribu untuk kategori

Festival Presale 3, dan Rp150 ribu untuk kategori Festival Normal.

Selain itu, tersedia tiket Premium Festival seharga Rp250 ribu dan Rp350 ribu serta VIP Upperdeck seharga Rp2 juta. Pemesanan tiket dapat dilakukan lewat aplikasi BBO. Harga yang tertera pada tiket belum termasuk pajak dan biaya platform.

### Biografi Slank

Slank adalah salah satu band senior di tanah air. Band ini didirikan pada 26 Desember 1983 di Jakarta dan berulang kali mengalami pergantian formasi (tercatat hingga 14 kali). Namun sejak 1997, Slank yang beranggotakan Kaka (Akhadi Wira Satriaji/vokal), Bimbim (Bimo Setiawan Almachzumi/drum), Ridho (Muhammad Ridwan Hafiedz/gitar), Abdee (Abdee Negara Nurdin/gitar) dan Ivanka (bassist), belum mengganti formasinya lagi hingga saat ini. Nama Slank dipilih karena masyarakat menjuluki mereka sebagai band "slengekan". Namun tak disangka, nama tersebut malah menempatkan Slank di jajaran band papan atas Indonesia.

Bimbim awalnya mendirikan band dengan nama CSC (Cikini Stones Complex) yang khusus menyanyikan lagu-lagu The Rolling Stones. Namun karena jenuh, band ini akhirnya bubar. Tak lama setelahnya, Bimbim membuat band lagi yang dinamai Red Evil. Seiring perjalanan waktu, nama Red Evil berganti menjadi Slank bersamaan dengan direkrutnya para personel baru.

Slank melejit sejak merilis album pertama, "Suit... Suit... He... He..." (Gadis Sexy) pada tahun 1990. Jika dilihat dari tahun terbentuk dan rilisnya album pertama, memang terdapat selang waktu yang cukup lama. Saat itulah terjadi berbagai konflik dan pergantian personel di tubuh Slank. Namun berbagai masalah yang sempat mengguncang keutuhan Slank tersebut akhirnya terbayar dengan meledaknya album "Suit... Suit... He... He..." (Gadis Sexy)".

Slank merilis album selanjutnya, yaitu "Kampung" (1991), "Piss!" (1993), "Generasi Biru" (1995), "Minoritas" (1996), "Lagi Sedih" (1996), "Tujuh" (1997), "Mata Hati Reformasi" (1998), "999+09" (1999), "Virus" (2001), "Satu Satu" (2003),

"Bajakan" (2003), "Road to Peace" (2004), "P.L.U.R" (2005), "Slankkisme" (2006) dan "Slow But Sure" (2007).

Saat pembuatan album keempat, Bimbim dan Kaka terjerat narkoba, menyebabkan pergantian personel karena yang lain tidak tahan dengan perilaku mereka. Setelah berusaha, keduanya berhasil terlepas dari narkoba dan merilis album ketujuh, "Tujuh" (1997), bersama tiga personel baru. Album ini menampilkan single "Balikin" yang mencerminkan pengalaman mereka.

Slank memulai langkah go international setelah mengirim demo ke Studio City Sound pada 2006, yang mengantarkan mereka merilis album "Anthem For The Broken Hearted - USA Edition" di Amerika. Mereka melanjutkan dengan kolaborasi bersama band Jepang, The Big Hip, menghasilkan album kedua "Slank feat. Big Hip-Japanese Edition" pada 2008. Untuk merayakan ulang tahun ke-24 Slank, The Big Hip diundang sebagai bintang tamu di konser "From Slank With Love" di Surabaya. (nei,ist/dya)



# Buah yang Paling Cepat Turunkan Asam Urat

**ASAM URAT** yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan kondisi yang sangat menyakitkan dikenal sebagai asam urat, atau penyakit asam urat. Kondisi ini terjadi ketika kristal urat terbentuk di dalam sendi, menyebabkan peradangan dan nyeri yang intens.

Salah satu cara efektif untuk mengelola dan mencegah tingginya kadar asam urat adalah melalui diet, khususnya dengan mengonsumsi buah-buahan yang dapat membantu menurunkan kadar tersebut.

Buah-buahan termasuk makanan rendah purin yang aman dikonsumsi penderita asam urat. Kandungan vitamin dan antioksidan pada buah juga dapat membantu menurunkan asam urat tinggi serta mengurangi nyeri dan peradangan akibat serangan gout.

Simak lebih lanjut untuk mengetahui buah yang paling cepat menurunkan asam urat.

## Buah apa yang paling cepat menurunkan asam urat?

Disarikan dari WebMD dan Healthshots, berikut sederet buah yang dapat dikonsumsi untuk membantu mengatasi asam urat tinggi:

### 1. Ceri

Menurut penelitian, buah ceri punya manfaat potensial dalam menurunkan kadar asam urat dalam darah.

Hal itu karena ceri mengandung antosianin atau pigmen berwarna merah-ungu yang memiliki sifat antioksidan dan anti-inflamasi.

Antioksidan dapat menghambat produksi asam urat dalam tubuh. Adapun efek anti-inflamasi pada buah ceri dapat mencegah dan meringankan nyeri serta peradangan akibat gout.

### 2. Lemon

Air perasan atau jus lemon bisa membantu menurunkan asam urat tinggi karena kaya vitamin C dan antioksidan untuk menetralkan asam urat dalam tubuh.

Makan buah lemon juga mendorong pelepasan kalsium karbonat sehingga dapat menurunkan kadar asam urat dan mencegah serangan gout.

### 3. Jeruk

Seperti lemon, jeruk juga termasuk buah yang bisa menurunkan asam urat dengan cepat dan mencegah serangan gout.

Namun, penderita asam urat yang mengonsumsi kolkisin (obat untuk mencegah dan mengurangi rasa sakit akibat asam urat) kurang dianjurkan makan jeruk karena bisa menimbulkan interaksi.

### 4. Alpukat

Buah alpukat mengandung omega-3, asam lemak yang bagus untuk mengurangi risiko serta gejala akut dari asam urat.

Alpukat juga kaya akan vitamin E, antiinflamasi yang bisa meredakan bengkak dan akibat nyeri asam urat.

### 5. Pisang

Buah berdaging lembut ini kaya akan vitamin C yang bagus untuk mengurangi penyerapan asam urat di tubulus ginjal.

Mengonsumsi pisang juga dapat mengeluarkan kelebihan asam urat dari tubuh melalui urine.

### 6. Apel

Studi membuktikan asam malat pada buah apel bisa menetralkan efek asam urat dalam tubuh.

## Karena itu, makan apel bisa menjaga asam urat di batas normal.

Selain mengonsumsi buah penurun asam urat, penderita juga perlu melakoni gaya hidup sehat, seperti membatasi atau menghindari makanan tinggi purin, istirahat cukup,

dan olahraga rutin.

## Penderita asam urat juga perlu disiplin minum obat dari dokter.

### 7. Stroberi

Buah stroberi, dengan rasa manis dan asamnya, direkomendasikan untuk penderita asam urat karena tinggi akan antioksidan dan sifat antiinflamasi.

Buah berry lain seperti blueberry dan raspberry juga sangat baik dikonsumsi untuk meredakan nyeri.

### 8. Delima

Buah delima yang kaya antioksidan dan antiinflamasi sangat efektif dalam meredakan nyeri akibat asam urat. Jus delima juga merupakan alternatif menyegarkan untuk dikonsumsi.

### 9. Pepaya

Pepaya mengandung papain, enzim dengan sifat antiinflamasi alami yang menjadikan buah ini baik untuk penderita asam urat.

Tingginya kandungan vitamin C di dalam pepaya juga memberikan perlindungan tambahan bagi tubuh.

### 10. Buah Kiwi

Kiwi memberikan banyak manfaat kesehatan, termasuk dalam mengatur kadar asam urat karena kaya akan potasium, folat, vitamin C, dan vitamin

E yang berfungsi sebagai antioksidan dan mencegah penguatan asam urat.

Apakah akibatnya jika kadar asam urat tinggi?

Dilansir dari Mayo Clinic, kadar asam urat dianggap tinggi apabila melebihi batas normal, yaitu di atas 6,0 mg/dL pada wanita dan 7,0 mg/dL pada pria.

Kadar asam urat yang tinggi dan tidak terkontrol dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan serius, terutama pada persendian dan ginjal. Salah satu dampak langsung dari kadar asam urat yang berlebihan adalah risiko mengalami serangan gout, yang ditandai dengan nyeri hebat pada persendian serta peradangan yang bisa membuat sendi membengkak, kemerahan, dan panas saat disentuh.

Serangan gout ini bisa berlangsung beberapa hari hingga beberapa minggu, dan jika tidak diobati, dapat mengganggu fungsi sendi, menyebabkan seseorang sulit bergerak atau bahkan mengurangi kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Selain menyerang persendian, tingginya kadar asam urat juga berisiko menumpuk pada ginjal dan membentuk batu ginjal.

Menurut Yankes Kemenkes, batu ginjal yang menumpuk atau mencapai ukuran besar bisa menghambat aliran urin, menyumbat saluran kencing, dan pada kasus yang lebih parah, berpotensi menyebabkan kerusakan ginjal permanen apabila tidak segera diatasi.

Oleh karena itu, penting bagi penderita asam urat untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang sesuai agar kadar asam urat dalam tubuh tetap terkendali, sehingga risiko komplikasi jangka panjang dapat diminimalkan. (nei,ist/dya)



# Mobil Maung PT Pindad

## Akan Jadi Kendaraan Dinas Pejabat Negara

**PRESIDEN** Prabowo ingin menjadikan kendaraan Maung sebagai kendaraan resmi negara yang akan digunakan oleh pejabat tingkat menteri hingga wali kota.

Prabowo mengatakan, penggunaan Maung Garuda ini sebagai bentuk kehormatan dan kebanggaan atas produksi bangsa sendiri.

Selain itu, Presiden Prabowo melalui Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan, bahwa kekuasaan menteri kabinetnya menggunakan mobil mewah impor. Dia menyebut pada pekan depan para menteri harus menggunakan mobil buatan dalam negeri.

"Saya dan teman-teman di Kabinet Merah Putih lainnya sudah tidak akan memakai mobil Toyota Alphard tapi pakai mobilnya Maung itu. Ini karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai menteri, ini sangat luar biasa," kata Anggito Abimanyu saat memberikan Perayaan pada acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin, (28/10/2024).

Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto meminta pejabatnya menggunakan mobil buatan anak bangsa. Tidak hanya para menteri, pejabat eselon I dalam Kabinet Merah Putih akan dilarang menggunakan mobil mewah buatan luar negeri.

Prabowo menyatakan bahwa pilihan ini bertujuan memajukan industri otomotif nasional dan mempromosikan karya anak bangsa sebagai kendaraan resmi negara. PT Pindad telah mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 70% pada mobil Maung, berkat kontribusi Profesor Sigit Santosa dari ITB. Ke depan, kendaraan Maung

diharapkan menjadi pilihan utama bagi menteri, wakil menteri, dan pejabat daerah.

### VARIASI KENDARAAN MAUNG

PT Pindad memproduksi beberapa varian dari kendaraan taktis Maung, termasuk:

- **Maung Tangguh:** dirancang tanpa pintu, menawarkan kelincahan di medan ekstrem.

- **Maung Komando:** dilengkapi atap Hard Top, cocok untuk misi taktis.

- **Maung Jelajah :** dengan atap Soft Top, memberikan kenyamanan untuk perjalanan jarak jauh.

Untuk kendaraan kepresidenan, PT Pindad mengembangkan MV3 Garuda Limousine—varian khusus yang telah disesuaikan dengan standar keamanan dan kenyamanan tingkat tinggi. Mobil ini pertama kali digunakan oleh Presiden Prabowo pada acara pelantikan dirinya dan Gibran Rakabuming Raka, serta pada acara militer di Magelang.

### KEUNGGULAN MAUNG MV3 GARUDA LIMOUSINE

#### 1. Desain Elegan dan Simbol Kebanggaan

Mv3 Garuda Limousine tampil dengan warna putih eksklusif yang memberikan kesan elegan dan unik, dilengkapi dengan motif batik parang pada grill depan, emblem Garuda, dan tiang bendera. Logo Garuda yang menghiasi velg mobil juga dibuat statis, menambah kesan prestise kendaraan ini sebagai simbol resmi kepresidenan.

#### 2. Keamanan Tingkat Tinggi

Sebagai kendaraan khusus kepresidenan, Maung Garuda Limousine dilapisi bahan komposit antipeluru yang mampu menahan peluru kaliber 5,56 mm hingga 7,62 mm. Ban menggunakan teknologi Run Flat Tire (RFT), memungkinkan mobil tetap bergerak sejauh 80 km meskipun ban mengalami kebocoran. Sistem keamanan dilengkapi dengan kamera 360 derajat, memberikan pandangan menyeluruh terhadap lingkungan sekitar untuk menjaga keamanan presiden.

#### 3. Performa Tangguh

Di bawah kap mesin, Garuda Limousine dilengkapi mesin berkekuatan 202 PS dengan transmisi otomatis 8 kecepatan, mampu mencapai kecepatan hingga 100 km/jam. Kendati demikian, kecepatan maksimal kendaraan dibatasi untuk menjamin keselamatan dan stabilitas selama digunakan sebagai kendaraan kepresidenan.

#### 4. Kenyamanan Premium

Interior Maung Garuda Limousine dirancang dengan kenyamanan maksimal, dengan jok kulit beraksen beige, dan kursi belakang bergaya Captain Seat. Panel kontrol limo touch di bagian belakang memungkinkan penumpang mengatur suhu, pencahayaan, dan posisi kursi sesuai kebutuhan.

#### 5. Teknologi Modern

Fitur modern melengkapi kendaraan ini, termasuk panel instrumen LED pada dashboard, pengisian daya ponsel nirkabel, dan konektivitas Bluetooth. Pintu mobil dilengkapi pijakan otomatis yang muncul saat pintu dibuka, memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi pengguna. (nei,ist/dya)



# Wisata Unik dan Cantik di *Pink Beach*, Pantai dengan Pasir Berwarna Pink

**PINK BEACH** terletak di Pulau Komodo, merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Pantai ini berada di sisi timur pulau dan berjarak sekitar 30 km dari Labuan Bajo, kota pelabuhan yang menjadi akses utama menuju taman nasional.

Dengan lokasinya yang strategis, Pink Beach tidak hanya menawarkan keindahan yang memukau, tetapi juga mudah dijangkau oleh wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan keanekaragaman hayati di sekitarnya.

Pasir di Pink Beach memiliki warna pink yang unik, berasal dari kombinasi pasir putih halus dan serpihan karang merah.

Warna ini terlihat lebih cerah saat sinar matahari menyinari pantai, menciptakan panorama yang sangat menarik untuk diabadikan.

Air laut di sekitar Pink Beach sangat jernih, dengan nuansa biru dan hijau yang memikat, menjadikannya tempat yang ideal untuk snorkeling dan diving.

Para penyelam dapat menjelajahi terumbu karang yang kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk berbagai spesies ikan tropis, anemon laut, dan organisme laut lainnya.

Terumbu karang di kawasan ini juga menjadi habitat bagi spesies langka, seperti penyu dan ikan napoleon.

Untuk mengunjungi Pink Beach, pengunjung perlu membayar tiket masuk ke Taman Nasional Komodo.

Biaya tiket untuk wisatawan domestik berkisar antara Rp 150.000 hingga Rp 250.000, sementara untuk wisatawan mancanegara, harganya biasanya antara Rp 600.000 hingga Rp 1.000.000.

Pengunjung biasanya mencapai Pink Beach dengan menyewa perahu dari Labuan Bajo, dengan perjalanan yang memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam tergantung pada kondisi cuaca dan jenis kapal.

Biaya sewa perahu bervariasi, biasanya berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 2.000.000 untuk perjalanan pulang-pergi.

Total biaya kunjungan ke Pink Beach dapat berkisar antara Rp 1.250.000 hingga Rp 3.000.000 per orang, tergantung pada status wisatawan dan pilihan transportasi.

## Fenomena Pasir Pink

Pasir di Pink Beach mendapatkan warna pinknya yang khas dari campuran pasir putih dan pecahan karang merah. Pecahan karang ini

berasal dari organisme mikroskopis bernama Foraminifera, yang memiliki cangkang berwarna merah terang.

Ketika cangkang ini terhempas oleh ombak dan bercampur dengan pasir putih, terbentuklah warna pink yang cantik dan unik.

## Aktivitas Wisata

Pink Beach tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga beragam aktivitas wisata yang menarik.

Snorkeling dan diving adalah dua kegiatan utama yang banyak digemari wisatawan.

Keindahan bawah lautnya dengan terumbu karang yang masih alami dan kehidupan laut yang beragam membuat pengalaman menyelam di sini tak terlupakan.

Airnya yang jernih memungkinkan para penyelam melihat dengan jelas berbagai spesies ikan tropis, kura-kura laut, dan bahkan pari manta.

## Trekking dan Menikmati Pemandangan

Selain aktivitas air, pengunjung juga dapat menikmati trekking di sekitar pantai. Terdapat beberapa jalur yang membawa wisatawan ke puncak bukit,

di mana pemandangan panorama Pink Beach dan sekitarnya dapat dinikmati dengan leluasa.

Waktu terbaik untuk trekking adalah saat matahari terbenam, ketika pantulan sinar matahari membuat pasir pink terlihat semakin menawan.

## Konservasi dan Keberlanjutan

Sebagai bagian dari Taman Nasional Komodo, Pink Beach juga merupakan area yang dilindungi untuk melestarikan ekosistem laut dan daratnya yang kaya.

Tempat ini dihuni oleh beragam spesies flora dan fauna, termasuk terumbu karang, ikan, serta hewan langka seperti komodo.

Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dan upaya konservasi yang berkelanjutan menjadi sangat penting guna memastikan keindahan dan keanekaragaman hayati di kawasan ini tetap terjaga untuk generasi mendatang. Wisatawan diimbau untuk selalu mematuhi aturan yang ada, seperti menghindari tindakan yang merusak terumbu karang, menjaga jarak dari satwa liar, dan tidak membuang sampah sembarangan. Partisipasi aktif dari pengunjung dalam menjaga lingkungan ini. (nei,ist/dya)



## Subsidi BBM ... (dari Hal 1)

**SERIKAT** buruh berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi (MK), atas dikabulinya sebagian gugatan uji materi Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Menurut Presiden KSPI Andi Gani Nena Wea mengatakan, 70 persen dari gugatan buruh dikabulkan oleh MK.

"Semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada sembilan hakim, putusan ini sangat luar biasa buat kami, mengembalikan muruah perjuangan buruh Indonesia yang sudah berkeringat, berjuang di jalanan selama bertahun-tahun," ucap Andi saat aksi di depan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

"Dan hari ini hampir 70 persen gugatan kami dimenangkan," tambah dia. "Ya, 30 persen tidak. Tapi kami sangat dapat mengerti. Tidak mungkin sebuah gugatan diberikan 100 persen," ujarnya.

Ada berapa gugatan yang dimenangkan serikat buruh, yakni soal upah sektoral dan struktur skala upah, pembatasan outsourcing atau pihak ketiga, dan pembatasan tenaga kerja asing. Pilpres AS Bakal Menentukan Nasib Kripto Artikel Kompas.id "Kembali upah sektoral ini merupakan sejarah luar biasa buat perjuangan buruh Indonesia," jelas Andi.

Selain itu, MK juga mengabulkan permintaan buruh soal pemutusan hubungan kerja (PHK) agar tidak sepihak dan harus melalui mediasi. "Dengan putusan MK, (nantinya) PHK tidak akan semena-mena karena harus ada perundingan," ucap Andi.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

"Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam UU Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Partai Buruh. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak berdasar menurut hukum.

Adapun, pokok permohonan yang dikabulkan MK tersebut berkenaan dengan norma Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4; Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12; Pasal 57 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 13; Pasal 64 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 18; Pasal 79 ayat (2) huruf b dan Pasal 79 ayat (5) dalam Pasal 81 angka 25; Pasal 88 ayat (1), Pasal 88 ayat (2), serta Pasal 88 ayat (3) huruf b dalam Pasal 81 angka 27;

Kemudian, Pasal 88C, Pasal 88D ayat (2), Pasal 88F dalam Pasal 81 angka 28; Pasal 90A dalam Pasal 81 angka 31; Pasal 92 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 33; Pasal, 95 ayat (3)

dalam Pasal 81 angka 36; Pasal 98 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 39; Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 81 angka 40; Pasal 157A ayat (3) dalam Pasal 81 angka 49; dan Pasal 156 ayat (2) dalam Pasal 81 angka 47 UU Cipta Kerja.

Sementara itu, satu pokok permohonan yang tidak dapat diterima adalah berkenaan dengan norma Pasal 156 ayat (4) dalam Pasal 81 angka 47 UU Cipta Kerja. MK tidak dapat menerima karena pokok permohonan terkait pasal dimaksud bersifat prematur.

Terpisah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan, keputusan MK perlu menjadi perhatian dari pemerintah untuk menyempurnakan lagi peraturan ketenagakerjaan dalam UU Ciptaker.

"Ini momen yang pas untuk Presiden Prabowo mensejahterakan buruh," kata Piter saat dihubungi Tribun, Kamis (31/10/2024).

Menurutnya, kehidupan buruh yang sejahtera akan berdampak kepada ekonomi nasional, dan akhirnya target pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa dicapai. Ia melihat selama ini pemerintah hanya memikirkan harga barang murah di pasar tetapi tidak memikirkan nasib buruh.

"Paradigmanya mesti diubah, sejahterakan buruh, pengusaha diberikan insentif. Sehingga investasi juga akan bertumbuh, salah satu komponen investasi itu tenaga kerja," paparnya.

### Soal Tenaga Kerja Asing

Salah satu yang dikabulkan adalah terkait klaster tenaga kerja asing (TKA). Uji materi nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh dkk ini mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 42 Ayat (4) dalam Pasal 81 angka 4 UU Nomor 6 Tahun 2023.

Pasal itu berbunyi "Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki".

Dalam pertimbangannya, MK berpandangan bahwa TKA yang dapat dipekerjakan di Indonesia hanya tenaga hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu serta dengan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

Namun, menurut MK, pengisian pekerjaan dalam jabatan dan waktu tertentu tersebut harus tetap mengutamakan pempekerjakan tenaga kerja Indonesia.

"Penting bagi Mahkamah untuk menyatakan Pasal 42 Ayat 4 dalam Pasal 81 angka 4 UU Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, 'Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki, dengan memperhatikan penggunaan penggunaan tenaga kerja Indonesia,'" kata Hakim MK Arief Hidayat dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat,

Kamis (31/10/2024).

Dalam gugatan ini, kata Arief, para pemohon khawatir norma Pasal 42 Ayat 4 dalam Pasal 81 angka 4 UU Nomor 6 Nomor 2023 menjadi pintu masuknya TKA yang tidak terampil atau unskilled labour secara masif, sehingga mereduksi kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

Oleh karena itu, para pemohon memohon agar norma Pasal ini dimaknai, 'Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia sesuai dengan jabatan yang akan diduduki'.

Mahkamah berpandangan, norma pasal yang diuji memang berpotensi membuka peluang bagi TKA yang tidak memiliki kompetensi atau unskilled labour untuk dipekerjakan di Indonesia, sehingga merugikan tenaga kerja Indonesia.

Namun, dalam menjawab pertanyaan tersebut, MK mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi hak-hak pekerja Indonesia, dengan menilai secara proporsionalitas antara kebutuhan akan TKA dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia

Arief menyampaikan, secara konstitusional, Pasal 27 Ayat 2 UUD Tahun 1945 menyatakan, 'tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan'. Norma tersebut telah menegaskan adanya tanggung jawab negara untuk menciptakan kondisi di mana warga negara memperoleh akses yang adil terhadap kesempatan kerja.

Menurut MK, kehadiran TKA yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dan terbatas pada kebutuhan tertentu dapat berdampak negatif pada pasar kerja di Indonesia.

Di sisi lain, MK juga memahami bahwa memberi kesempatan kerja bagi TKA di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari terutama untuk sektor-sektor yang memerlukan keahlian khusus yang belum dapat dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. Namun, kata Arief, hal yang perlu ditekankan dalam penggunaan TKA adalah harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas dan terukur, serta tidak boleh merugikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

"Artinya, bilamana norma undang-undang tidak memberikan pembatasan, peraturan yang lebih rendah berpotensi untuk melanggar pembatasan terhadap TKA tersebut sehingga memungkinkan suatu perusahaan menyerap TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus," ucap dia.

Padahal, lanjut Arief, semangat norma Pasal 42 Ayat 4 Pasal 81 angka 4 UU 6 Tahun 2023 adalah menekankan pada kompetensi yang harus dimiliki sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya. Oleh karena itu, data calon TKA dalam pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) harus didukung dengan dokumen yang menunjukkan kriteria kompetensi dimaksud, yaitu sertifikat kompetensi, termasuk ijazah pendidikan. (wid, rls ist, ant, kcm/dya)

## DAFTAR PASAL-PASAL YANG DIUBAH MK

Lanjutan dari hal 1...

10. Menyatakan frasa 'struktur dan skala upah' pasal 88 ayat 3 huruf b dalam pasal 81 angka 27 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'struktur dan skala upah yang proporsional'

11. Menyatakan Pasal 88C UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral di provinsi dan dapat di kabupaten/kota.

12. Menyatakan Frasa 'indeks tertentu' dalam pasal 88D ayat 2 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan sebagai variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh.

13. Menyatakan Frasa 'dalam keadaan tertentu' dalam pasal 88F UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan mencakup bencana alam atau nonalam serta kondisi luar biasa perekonomian global/nasional yang ditetapkan oleh Presiden.

14. Menyatakan Pasal 90A UU 6/2023 yang menyatakan 'upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan mencakup kesepakatan dengan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan.

15. Menyatakan Pasal 92 ayat 1 UU 5/2023 yang menyatakan 'Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan mencakup kreditur preferen, kecuali kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

16. Menyatakan Pasal 95 ayat 3 UU 6/2023 yang menyatakan 'Hak lainnya dari pekerja/buruh didahulukan pembayarannya atas semua kreditur' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan mencakup kreditur preferen, kecuali kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

17. Menyatakan Pasal 98 ayat 1 UU 6/2023 yang menyatakan 'Dewan pengupahan dibentuk untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan bahwa dewan pengupahan berpartisipasi secara aktif.

18. Menyatakan Frasa 'wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh' dalam pasal 151 ayat (3) UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan sebagai perundingan bipartit yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

19. Menyatakan Frasa 'Pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial' dalam pasal 151 ayat (4) UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan bahwa pemutusan hanya dapat dilakukan setelah penetapan dari lembaga penyelesaian jika perundingan bipartit gagal.

20. Menyatakan Frasa 'dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial' dalam pasal 157A ayat (3) UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat, kecuali diartikan sampai berakhirnya proses penyelesaian yang berkekuatan hukum tetap sesuai undang-undang PPHI.

21. Menyatakan frasa 'diberikan dengan ketentuan sebagai berikut' pasal 156 ayat 2 dalam pasal 81 angka 47 UU 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'paling sedikit'.

# Usai Tom Lembong, Kejagung Buka Peluang Bidik Mantan Mendag Lain

**JAKARTA-** Kejaksaan Agung terus menelusuri dugaan aliran uang yang melibatkan Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung, bakal melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap sejumlah Menteri Perdagangan (Mendag) yang menjabat setelah Tom Lembong.

Diketahui, Mendag berikutnya di kabinet Presiden Joko Widodo adalah Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Luthfi, serta Zulkifli Hasa

"Untuk perkara yang terkait gula kan baru kemarin ya ditetapkan tersangka, sudah barang tentu penyidik terus melakukan pendalaman," kata Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Abdul Qohar, di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Menurutnya, penyidik Gedung Bundar masih melakukan pendalaman terhadap dua tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Tom Lembong. Kemudian, Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Qohar memastikan ke depannya pendalaman kasus tersebut di era menteri setelah Tom Lembong bakal dilakukan. Tom diketahui hanya menjabat sebagai Menteri Perdagangan dari 2015-2016. Setelahnya, ia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Nanti tidak menutup kemungkinan seiring waktu kita akan menuju ke sana ya (Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong, Sabar. Jadi kita sejak ditetapkannya Pak Tom Lembong sebagai tersangka, sekarang kita fokus ke sana," jelasnya.

Setelah Tom Lembong digeser Jokowi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sekarang Kementerian Investasi, ada empat tokoh yang sempat menduduki kursi Menteri Perdagangan. Keempat tokoh tersebut adalah Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Luthfi, dan Zulkifli Hasan.

Kebijakan impor gula sendiri tidak hanya terjadi saat Tom Lembong menjadi menteri. Namun hampir semua Menteri Perdagangan menjalankan kebijakan serupa. Bahkan, jumlahnya lebih besar dari Tom Lembong.

Menurut data ada 2015 Tom Lembong tercatat mengimpor gula sebanyak 4,36 juta ton. Kemudian pada 2016, impor gula itu meningkat menjadi 5,02 ton.

Usai Tom Lembong mendapat tugas baru dari Jokowi, posisi Mendag diduduki politikus dari Partai NasDem, Enggartiasto Lukita. Selama menjabat di periode 2017-2019, Enggartiasto tercatat mengimpor gula kristal sebanyak 13,97 juta ton. Pada 2017, Enggartiasto mengimpor gula



(Ilustrasi) Pekerja melakukan bongkar muat gula kristal putih impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (Dokist)

sebanyak 4,40 juta ton. Kemudian pada 2018, dia mengimpor 5,48 juta ton, dan 4,09 juta ton di akhir masa jabatannya.

Di periode kedua kepemimpinan Jokowi, kursi Menteri Perdagangan diamanahkan kepada Agus Suparmanto. Selama setahun menjabat, Agus mengimpor 5,53 juta ton gula. Tingkat estafet Menteri Perdagangan kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Luthfi.

Selama dua tahun menjabat, Luthfi mengimpor gula kristal sebanyak 11,49 juta ton. Pada 2021 dia mengimpor 5,48 juta ton, sedangkan pada 2022 mengimpor 6,01 juta ton. Angka tersebut menjadi volume impor gula paling besar di antara menteri-menteri lain.

Menteri Perdagangan terakhir di era Presiden Joko Widodo adalah Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu pada 2023 mengimpor gula sebanyak 5,06 juta ton.

Terpisah, Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, kasus penetapan tersangka korupsi gula yang menjerat Tom Lembong mengandung kejanggalan.

Menurutnya, kebijakan impor gula bukan hanya keputusan satu menteri namun merupakan keputusan kolektif yang diterapkan oleh beberapa Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi.

"Menteri-menteri perdagangan lain sejak 2013, seperti Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, dan Muhammad Luthfi kita juga tahu semuanya memberikan izin impor gula dengan alasan yang beragam, dari stabilisasi harga hingga menjaga pasokan dalam negeri tapi kenapa hanya Tom Lembong yang ditahan, ini jadi standar ganda," kata Achmad kepada Media Indonesia pada Kamis (31/10/2024).

Achmad menjelaskan bahwa pola kebijakan impor gula harus dievaluasi secara total, tak hanya pada masa satu menteri namun juga semua menteri. Menurutnya, hal ini semakin aneh mengingat data tahun-tahun

berikutnya menunjukkan pola kebijakan yang sama, meskipun pemerintah sering mengklaim swasembada gula atau surplus gula, seperti pada 2018, 2021, dan 2022.

"Namun, izin impor terus diberikan dan bahkan mencapai angka tertinggi pada 2022. Kondisi ini mengundang spekulasi bahwa ada unsur tebang pilih dalam proses hukum terhadap Lembong," imbuhnya.

Lebih lanjut, Achmad menyampaikan bahwa izin impor telah diberlakukan oleh berbagai Menteri Perdagangan dalam periode tersebut. Secara logis kebijakan, maka seluruh pihak terkait termasuk menteri-menteri lain, harus diperiksa.

Tuduhan ini, kata Achmad, juga menimbulkan asumsi bahwa keterlibatan PPI dalam impor gula mungkin lebih besar dari sekadar pelaksana kebijakan. Selain itu, dinamika internal PPI juga berpotensi mempengaruhi arah kasus ini.

Selain itu, kasus ini semakin janggal lantaran juga muncul adanya keputusan serupa berulang kali terkait kebijakan impor gula yang dilakukan oleh menteri perdagangan lainnya di era yang sama namun tanpa konsekuensi hukum.

Misalnya, pada 2018, pemerintah mengumumkan swasembada gula, namun tetap memberikan izin impor sebesar 4,6 juta ton. Pada 2021 dan 2022, surplus gula nasional kembali diklaim, tetapi angka impor mencapai rekor tertinggi pada 2022 dengan lebih dari 6 juta ton.

"Bahkan kebijakan impor beras menunjukkan pola serupa, pemerintah sering mengklaim swasembada, tetapi tetap mengimpor dengan alasan menjaga harga atau persediaan," tandasnya.

## KPK Siap Telusuri Harta Tom Lembong

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti soal harta kekayaan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka

dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015.

Tindak lanjut dilakukan sebab dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tom Lembong tercatat tak miliki aset berupa tanah dan bangunan serta alat transportasi dan mesin.

"Informasi ini tentu akan kami segera cek dan tindaklanjuti terkait dengan kepatuhan-kepatuhan tersebut," kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung C1 KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Budi juga mengatakan bahwa KPK siap untuk menyerahkan hasil pengecekannya pada Kejaksaan Agung yang saat ini tengah mengusut kasus tersebut.

"Jika memang dibutuhkan informasi atau pun data dari LHKPN untuk mendukung proses hukum tersebut, tentu KPK sangat terbuka untuk memberikan dukungan," tuturnya.

Namun, Budi menyebut bahwa hingga saat ini, pihak Kejagung belum meminta KPK untuk menyampaikan informasi tersebut. "Informasi yang kami peroleh kami belum mendapatkan komputer tersebut," pungkasnya. (wid, rls, ist, ant/dya)

## IMPOR GULA OLEH MEDAG ERA MENTERI JOKOWI

### TOM LEMBONG

Pada 2015 Tom Lembong tercatat mengimpor gula sebanyak 4,36 juta ton. Kemudian pada 2016, impor gula itu meningkat menjadi 5,02 ton.

### ENGGARTIASTO LUKITA

Pada periode 2017-2019, tercatat mengimpor gula kristal sebanyak 13,97 juta ton. Pada 2017, Enggartiasto mengimpor gula sebanyak 4,40 juta ton. Kemudian pada 2018, dia mengimpor 5,48 juta ton, dan 4,09 juta ton di akhir masa jabatannya.

### AGUS SUPARMANTO

Selama setahun menjabat mengimpor 5,53 juta ton gula

### MUHAMMAD LUTHFI

Selama dua tahun menjabat mengimpor gula kristal sebanyak 11,49 juta ton. Pada 2021 dia mengimpor 5,48 juta ton, sedangkan pada 2022 mengimpor 6,01 juta ton.

### ZULKIFLI HASAN

Pada 2023 mengimpor gula sebanyak 5,06 juta ton.